



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : KETUT ARIYANI
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 691664

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m2/150 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	----
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	----
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	48.000.000
<b>Sub Total</b>	Rp.	248.000.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	448.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	-200.000.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I WAYAN WIRKA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 670749

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/300 m2 di KAB / KOTA TABANAN, LAINNYA Rp. 500.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	20.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOTOR, HONDA CB 150 R Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	---
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	520.000.000

**III. HUTANG** Rp. 228.333.543

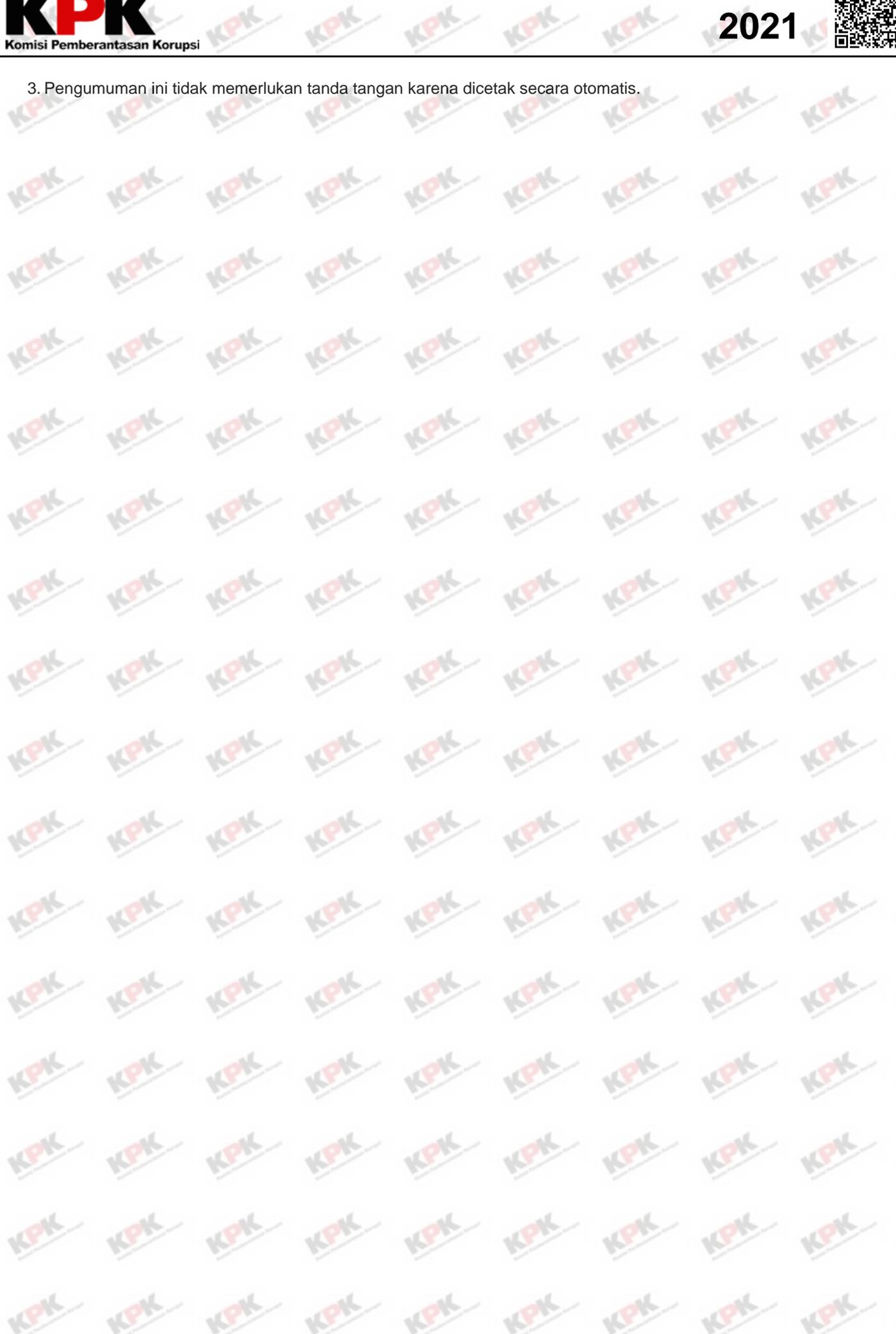
**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 291.666.457

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I WAYAN WIDYARDANA PUTRA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 522626

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m <sup>2</sup> /45 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	7.500.000
1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	41.700.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	----
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	449.200.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	108.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	341.200.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I KETUT SUNADRA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 805475

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 114.000.000

1. MOBIL, NISSAN MARCH 1.2 (4X20 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA C1M02N42LO A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA NC11A3C A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 13.500.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 21.697.838

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.149.197.838

**III. HUTANG** Rp. 170.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 979.197.838

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I KETUT RUDIA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 670751

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 200.000.000

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI  
Rp. 200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 209.400.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI  
Rp. 6.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI  
Rp. 28.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ Tahun 2018, HASIL SENDIRI  
Rp. 170.000.000
4. MOBIL, YAMAHA X-TRADE Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.  
5.400.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. ---

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 409.400.000

**III. HUTANG** Rp. 245.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 164.400.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.